

Pemilihan Standar Akuntansi Keuangan Yang Sesuai Dengan Industri UMKM di Kota Malang

Friyanto

STIE INDONESIA MALANG

e-mail: fri.friyanto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) - Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada bisnis XYZ. Latar belakang inilah yang membuat XYZ Enterprises menarik untuk dikaji guna mengetahui; 1) praktik pencatatan keuangan oleh UMKM, 2) faktor-faktor yang menyebabkan pencatatan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) UMKM (SAK EMKM) tidak dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang mengarah pada deskripsi dan penerapan pencatatan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) - Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) dengan melakukan wawancara dan pengambilan laporan keuangan untuk diolah agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) - Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Sistem pencatatan keuangan dilakukan secara manual dan masih sangat sederhana, 2) Faktor penyebab kegagalan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro Kecil Mmenengah (SAK EMKM) pada Bisnis XYZ adalah karena faktor internal seperti kurangnya pemahaman, disiplin dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternal karena kurangnya pengawasan dari pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan laporan keuangan

Kata Kunci: SAK EMKM, Sistem Pencatatan Laporan Keuangan, UMKM.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of Standar Akuntansi Keuangan (SAK) - Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) to XYZ's business. It is this background that makes XYZ Enterprises interesting to study in order to find out; 1) the practice of financial recording by the MSMEs, 2) the factors that cause the MSMEs Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) - based financial records to not be implemented. This research was conducted with a qualitative method that leads to the description and application of financial records based on Standar Akuntansi Keuangan (SAK) - Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) by conducting interviews and taking financial reports to be processed to conform to Standar Akuntansi Keuangan (SAK) - Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). The results of this study indicate that; 1) The financial recording system is carried out manually and is still very simple, 2) The factors that cause the failure of Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro Kecil Mmenengah (SAK EMKM) at XYZ Business are due to internal factors such as lack of understanding, discipline and

human resources, while external factors are due to lack of supervision from interested stakeholders with financial reports

Keywords : *SAK EMKM, financial report recording system, MSMEs*

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kinerja dari tiga pihak, yaitu pemerintah, individu, dan bisnis. Penilaian kinerja dari masing-masing pihak, utamanya pemerintah dan bisnis, dapat tergambar melalui prosedur akuntansi yang merupakan bahasa universal untuk bisnis.

Sebuah bisnis, baik besar maupun kecil, publik maupun swasta, baik untuk mencari keuntungan atau tidak mengutamakan keuntungan (nirlaba), akan selalu didorong oleh angka nominal yang tercatat dalam proses akuntansi entitas mereka (Wahyudiono, n.d.). Seorang manajer yang cerdas tahu bahwa angka tersebut akan berguna untuk melacak penjualan, mengelola persediaan, atau membuat perencanaan biaya produksi dan perhitungan-perhitungan gaji karyawan.

Sebuah perusahaan yang mengetahui fungsi dan peran akuntansi secara pasti akan mempertimbangkan beberapa aspek akuntansi di luar laporan keuangan sederhana dari sisi transaksi debit dan kredit saja (Warsono & Irene Natalia, n.d.). Produk dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang paling sedikit memberikan informasi mengenai aset, utang, modal, pendapatan dan beban (Riyanto, n.d.)

TUJUAN DAN FUNGSI AKUNTANSI

Tujuan utama dari setiap fungsi akuntansi adalah pencatatan keuangan yang berkelanjutan. Dan tujuan utama suatu entitas atau perusahaan adalah memperoleh laba (keuntungan). Untuk dapat memperoleh keuntungan yang maksimal perusahaan harus melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien. Menurut (Friyanto, 2012) tujuan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang menghendaki tersampainya informasi akuntansi yang memenuhi karakteristik kualitatif “*relevance*” (berkaitan dengan *decision making model* para pemakainya) dan “*reliable*” (dapat dipercaya) bisa terganggu.

Informasi keuangan dari semua jenis-jenis biaya dari biaya operasional, gaji, administrasi kantor, sumbangan, pengeluaran barang modal, investasi, arus kas, dan juga utilitas, harus diteliti minimal setiap bulan sekali. Hasil penelitian dan pelaporan keuangan tersebut akan menjadi sebuah catatan keuangan bisnis yang pada akhirnya dapat digunakan dalam berbagai cara dan memberi gambaran kepada seorang manajer tentang kondisi dan kesejahteraan finansial perusahaan pada waktu tertentu (Riyanto, n.d.)

Tiap data yang terkumpul dalam pencatatan keuangan hanya bermakna jika telah digunakan. Untuk menggunakan data dengan benar, seorang manajer keuangan akan memecah fungsi akuntansi menjadi dua bentuk utama yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kedua bentuk akuntansi ini mengandalkan arus data keuangan

yang sama, sedangkan perbedaan utama mereka terletak pada fokus dan orientasi waktunya.

1. Akuntansi Manajemen

Akuntansi yang digunakan secara internal untuk merencanakan dan mengambil langkah maju secara finansial. fokusnya bersifat internal dan melihat ke depan, namun akuntansi keuangan, fokusnya bersifat eksternal dan melihat ke belakang (Weston & Brigham, n.d.). Dengan fungsi ini, akuntan melihat riwayat catatan arus data keuangan serta ekonomi saat ini. Serta membuat asumsi tentang tren dan apa arti tren bagi masa depan perusahaan (Subramanyam & John, n.d.).

Akuntan manajerial akan melihat perlunya membuat kemajuan yang harus memberi dampak baik menurut departemen (Agus Harjito & Martono, 2014). Menurut wilayah atau lini produk, dan membuat perkiraan mengenai harapan penjualan, kinerja, harga, biaya, dan kebutuhan tenaga kerja.

Dengan peran akuntansi manajemen, seorang manajer keuangan akan mencoba memprediksi masa depan keuangan perusahaan (Hanafi, n.d.) Dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan harapan tersebut.

2. Akuntansi Keuangan

Peran akuntansi keuangan, penekanannya adalah saat melihat data masa lalu dengan tujuan untuk menentukan nilai sebuah perusahaan secara keseluruhan. Karena akuntansi keuangan ini disajikan lebih banyak untuk pihak eksternal perusahaan, maka penghitungannya harus tepat dan benar.

Akuntansi keuangan yang dicatat harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku untuk umum agar terhindar dari masalah hukum. Laporan akuntansi keuangan ini akan turut memengaruhi para pemegang saham dan investor untuk memutuskan apakah perusahaan publik bernilai *undervalued* atau murah atau sebaliknya (Dwi, n.d.) Sehingga layak diinvestasikan atau dinilai terlalu tinggi dan harus dihindari. Kreditur akan menggunakan informasi yang sama untuk memutuskan layak atau tidaknya untuk memberikan pinjaman. Apakah entitas memiliki catatan risiko yang rendah, sebelum memberi pinjaman uang kepada mereka. Pada instansi pemerintah akan menggunakan informasi ini untuk menentukan nilai pajak pada sebuah perusahaan.

Dari penjelasan di atas, sekilas kita akan memahami fungsi dan peran akuntansi bagi sebuah bisnis. Jika entitas masih mengalami kesulitan terkait dengan akuntansi perusahaan yang sedang dikelola, entitas bisa mendapatkan kemudahan dengan mendaftarkan bisnis perusahaan pada Jurnal. Jurnal adalah aplikasi akuntansi perusahaan berbasis *cloud* yang memudahkan entitas dalam proses akuntansi seperti membuat laporan keuangan (Irsyad, n.d.). Entitas dapat lebih mudah, cepat, dan aman dalam mengelola dan memonitor keuangan bisnisnya di manapun berada dan lebih cepat menyusun laporan keuangan secara *realtime* (Sevany, n.d.)

Laporan keuangan memberikan informasi yang berhubungan dengan tingkat rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, risiko, aliran kas. Rasio-rasio tersebut terbentuk dari perbandingan antar rekening dari laporan keuangan yang dapat dipakai

sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan. Menurut Weston & Brigham, (2006) memberikan pengelompokan rasio keuangan lebih rinci yaitu; 1) rasio likuiditas, 2) rasio solvabilitas 3) rasio aktivitas dan 4) rasio profitabilitas.

Aturan mengenai kewajiban penyusunan laporan keuangan khususnya ditetapkan untuk pemerintah dan bisnis swasta guna menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan dengan stakeholder masing-masing pihak (Hanafi, n.d.). Namun perlu diperhatikan bahwa laporan keuangan dapat direkayasa oleh manajemen sehingga terlihat baik, agar terhindar dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen, diperlukan audit terhadap laporan keuangan. Auditing atas laporan keuangan adalah proses pemeriksaan oleh pihak yang independen atas laporan keuangan sebagai laporan akuntabilitas pihak tertentu kepada pihak pemberi wewenang.” (Friyanto, 2012).

Kinerja Keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja Keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan (Ujiyantho & Pramuka, n.d.). Kinerja Keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subyektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam mengoperasikan bisnis dan meningkatkan laba perusahaan

Menurut (Rosdiana, n.d.) dalam kaitannya dengan perpajakan, laporan keuangan juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang atas laba perusahaan yang diperoleh setelah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan.

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan kompleksitas transaksi yang bahkan sudah tidak mengenal batas negara, standar tunggal yang mengatur mengenai akuntansi menjadi penting adanya. Hal ini untuk dasar penyusunan informasi keuangan yang sama sehingga kinerja antar pihak dapat dinilai dan diperbandingkan dengan lebih baik. Di Indonesia, aturan tersebut tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Kartikahadi, n.d.) untuk bisnis dan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk (SAP) untuk Pemerintah.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Standar Akuntansi Keuangan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) (Indonesia, n.d.) yaitu: 1). Standar Akuntansi Keuangan Umum Konvergensi IFRS 2). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) 3). Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS) dan 4) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). Berikut adalah bagan SAK yang berlaku di Inonesia (Institut Akuntan Publik Indonesia, n.d.).

Bagan 1. SAK Yang Berlaku di Indonesia



Sumber : IAPI (2021)

1) Standar Akuntansi Keuangan Umum konvergensi IFRS

Standar ini umum digunakan untuk bisnis. Efektif sejak 1 Januari 2015, secara garis besar PSAK telah terkonvergensi dengan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* (Kartikahadi, n.d.) Namun, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) juga menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, ISAK 31, ISAK 32, ISAK 35 dan ISAK 36.

2) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik - ETAP

Standar ini disusun dengan bentuk pengaturan yang lebih sederhana yang sebagian besar menggunakan konsep biaya historis. Standar ini ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit).

3) Standar Akuntansi Keuangan Syariah - SAS

Standar ini disusun mengacu pada fatwa MUI dan ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi Syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non Syariah. Terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi *murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna.*

4) Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah - EMKM

Standar ini ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah dengan definisi yang mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tidak atau belum mampu

memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. SAK EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dan penerapan lebih dini dianjurkan.

Proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar merupakan poin penting untuk menunjukkan kinerja dan performa keuangan perusahaan. Kepatuhan pada standar akuntansi keuangan (PSAK) ditambah dengan pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia menjadi nilai tambah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat menampilkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya (Harahap, n.d.).

Pembahasan

Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam anggota G-20. Anggota G-20 merupakan negara-negara yang tergolong dalam perekonomian besar. Dengan kata lain, [laporan keuangan](#) di Indonesia harus mengacu pada *International Financial Report Standart (IFRS)* (Kartikahadi, n.d.) agar lajur modal antar negara pada Indonesia dapat berjalan lancar.

International Financial Reporting Standard (IFRS) sendiri mengacu pada PSAK. Dan hingga pada saat ini, Indonesia berhasil menerapkan IFRS ini hingga mencapai 90%. IFRS tidak dapat diterapkan secara keseluruhan karena di dalam IFRS sendiri terdapat akuntansi perkebunan dan tidak semua negara menerapkan akuntansi perkebunan termasuk Indonesia.

Perlu diketahui bahwa perusahaan-perusahaan besar di [Indonesia](#) sudah menerapkan IFRS dengan cukup baik, sedangkan entitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia masih kurang baik menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih belum memadai (Ediraras, n.d.)

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan kemajuan perusahaan secara periodik. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen (Munawir, 2004:32)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK ETAP) 2.1 (2016:3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga

menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Sariati, n.d.)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Menurut Ikatan Aluntan Indonesia dalam SAK ETAP 1.1 (2016:1) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

RUANG LINGKUP SAK ETAP

Menurut IAI dalam SAK ETAP 1.1 (2016:1), Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika:
 - a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.
 - b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik

yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

Semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, semakin berkembang pula beberapa usaha yang berkembang pada masyarakat Indonesia dari skala kecil, menengah, hingga besar. Di Indonesia sendiri jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) telah mencapai 90% dari jumlah usaha yang ada.

Namun, terdapat kendala utama pada UKM selain pada modal yaitu pada pengelolaan keuangan pada UKM karena masih menggunakan pembukuan yang sederhana dan masih mengabaikan standar. Padahal laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi yang berlaku akan membuat laporan keuangan yang akurat dan dapat membantu berkembangnya bisnis secara kuantitatif dan kualitatif.

Dengan adanya kepentingan tersebut, maka [Ikatan Akuntan Indonesia](#) (IAI) telah merancang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dapat digunakan oleh UKM sebagai acuan dalam laporan keuangan. Standart tersebut dinamakan SAK ETAP.

Yang melatar belakangi diperlukan SAK ETAP ini karena PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang mengadopsi IFRS (*International Financial Reporting Standard*) terlalu kompleks jika untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah (UKM) di Indonesia (Musnandar dalam Kholmi, 2011). Sehingga, SAK ETAP sangat cocok sebagai standar untuk acuan bisnis UKM di Indonesia.

SAK ETAP secara resmi telah ditetapkan pada tanggal 1 Januari 2011. Walaupun ada yang berpendapat bahwa SAK ETAP ini sudah ada yang menggunakan sejak per 1 Januari 2010, dan itu diperbolehkan. Laporan keuangan yang menggunakan SAK ETAP harus membuat pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) sebagai bentuk kepatuhan dalam laporan keuangan (Jumingan, n.d.)

Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang; 1) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan 2) Tidak menerbitkan laporan keuangan sebagai tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal.

1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan.

Dengan kata lain, bahwa SAK-ETAP tidak berlaku untuk perusahaan yang sedang mendaftar di pasar modal sebagai penerbitan efek di pasar modal, terkecuali untuk perusahaan yang telah mendapatkan ijin khusus dari SAK-ETAP. Perusahaan besar atau perusahaan *go-public* pun memiliki standar khusus yang telah ditentukan oleh BAPEPAM, yaitu menggunakan SAK-UMUM yang diadopsi sebagian dari IFRS. Pasar modal menjadi sumber dan alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh modal. Kini persaingan dalam pasar modal pun semakin ketat karena banyaknya perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (Fahmi, n.d.). Sehingga setiap perusahaan bersaing untuk melakukan pengembangan terhadap bidang

usahanya agar menjadi lebih kompetitif dalam dunia bisnis, tak terkecuali perusahaan pada sektor infrastruktur (Martalena, n.d.).

Menurut Tandelilin (Tandelilin, 2017), pengertian pasar modal adalah “Pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjual-belikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi dan reksa dana. Keberadaan pasar modal sangat penting artinya bagi perekonomian suatu negara. Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dan obligasi (*bond*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan (Fahmi, n.d.).

- 2) Tidak menerbitkan laporan keuangan sebagai tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal.

Pihak eksternal seperti bank, investor, dan kreditur tidak diperkenankan untuk menggunakan SAK-ETAP, karena terlalu sederhana dalam penyusunan laporan keuangan yang seharusnya menggunakan SAK-UMUM dengan mengambil dari Standar Internasional seperti IFRS.

Perusahaan Yang Cocok Menggunakan Standart Keuangan SAK ETAP

Adapun beberapa karakteristik SAK-ETAP yang digunakan sebagai acuan, perusahaan mana yang cocok menggunakan standart keuangan tersebut. Di antaranya adalah; 1) berdiri sendiri tanpa berpacu pada SAK-UMUM, 2) menggunakan *historical cost*, 3) hanya mengatur transaksi umum yang terjadi pada ETAP lebih sederhana dan 4) tidak berubah dalam beberapa tahun ke depan.

Manfaat Menggunakan SAK ETAP

Ketika para UKM menggunakan SAK ETAP sebenarnya memiliki beberapa manfaat, bukan hanya sebagai penyusunan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami saja, melainkan masih ada beberapa manfaat lainnya di antaranya; 1) UKM dapat menyusun laporan keuangan sendiri dan dapat diaudit juga dapat mendapatkan opini audit yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak eksternal (bank) 2) SAK ETAP lebih sederhana dalam implementasinya dibanding PSAK IFRS (SAK-UMUM) dan walaupun dengan menggunakan tampilan yang sederhana jika dibandingkan dengan PSAK IFRS (SAK UMUM), namun SAK ETAP masih bisa memberikan informasi yang akurat dalam penyajian laporan keuangannya.

Faktor yang Penyebab UKM Tidak Menggunakan SAK ETAP

Beberapa manfaat di atas dapat dirasakan oleh para pemilik UKM yang bahkan baru merintis UKM. Karena penyajian laporan keuangannya yang akurat dan praktis

untuk diimplementasikan. Namun, di Indonesia sendiri masih banyak UKM yang tidak menggunakan SAK ETAP, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya:

1. Minimnya sosialisasi mengenai SAK ETAP, dengan demikian maka para pelaku UKM masih merasa khawatir ketika menggunakan SAK ETAP karena penyajian laporannya yang dikhawatirkan tidak akurat (Auliyah, n.d.) Mereka masih tidak mau mengambil resiko untuk mengubah semua kebijakan keuangan yang sudah ada.
2. Pelaku UKM juga masih menganggap bahwa tidak menggunakan SAK ETAP tidak akan mempengaruhi usahanya yang masih dianggap bahwa laporan keuangannya sebagai laporan keuangan pribadi (Auliyah, n.d.)
3. Mereka juga masih khawatir untuk mendapatkan karyawan yang terlatih atau khusus di bidang akuntansi, padahal implementasi SAK ETAP sangatlah sederhana dan mudah dipahami (Sabella & Sari, n.d.)

Dengan adanya beberapa faktor demikian, maka di Indonesia sendiri masih sangat banyak UKM yang tidak menerapkan SAK ETAP sebagai acuan penyajian laporan keuangan dalam perusahaan. Walaupun SAK ETAP ini masih terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan. Bukan sebagai bahan pertimbangan untuk digunakan atau tidak, melainkan sebagai bahan pertimbangan untuk menangani dan mencari solusi pada kekurangan SAK ETAP, dan memanfaatkan kelebihan SAK ETAP sendiri. Berikut ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari SAK ETAP.

Kelebihan dan Kekurangan SAK ETAP

Kelebihan SAK-ETAP antara lain adalah; a) **lebih sederhana dari pada SAK UMUM** b) **mudah digunakan bagi UKM di Indonesia** dan c) **standar-standar yang ada dalam SAK ETAP yang konsisten alias tidak pernah berubah dalam jangka waktu yang panjang, sehingga proses penyusunan pun dapat dilakukan dengan hemat biaya dan tenaga.**

Kekurangan SAK ETAP

Keurangan SAK-ETAP saat ini hanya diketahui bahwa SAK-ETAP dengan kesederhanaannya dalam penyajian laporan keuangan dapat mengabaikan sesuatu yang tidak relevan alias terdapat informasi yang tidak dilaporkan secara wajar. Namun, setelah mengetahui kekurangan dari SAK-ETAP ini, setidaknya para pelaku UKM atau akuntan UKM mengetahui bagaimana solusinya dalam meminimalkan kekurangan tersebut.

SAK ETAP Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah

Dengan kata lain, bahwa [UKM](#) yang menggunakan SAK-ETAP, akan membuat UKM lebih profesional lagi dalam manajerial khususnya di keuangan sehingga dapat menyusun laporan keuangan yang handal dalam membantu pengembangan bisnis. Selain itu juga dapat mempermudah UKM untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak eksternal seperti bank atau investor. Mudah-mudahan meminjam dana ini dikarenakan adanya

data keuangan yang akurat dan handal dalam upaya meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi usaha.

Bisa dikatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan suatu standar keuangan yang mempermudah UMKM dalam membuat penyusunan laporan keuangan yang lebih informatif dan akurat agar memudahkan investor atau pihak eksternal untuk meminjamkan dana bantuan bagi perusahaan UMKM.

SAK Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM)

Standar EMKM (Indonesia.2016, n.d.) ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunanya yang merupakan perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. Sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan diatas EMKM merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia menempati angka sekitar 80 %. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 2018 DSAK IAI memberlakukan SAK baru khusus untuk Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM (Indonesia.2016, n.d.) di terbitkan untuk membantu EMKM di indonesia yang saat ini jumlahnya 57 juta serta memberikan....

Menurut SAK EMKM (2016), SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah. Dalam SAK EMKM mengatakan bahwa entitas mikro kecil dan menengah tanpa adanya akuntabilitas publik yang signifikan, seperti yang ditetapkan didalam SAK EMKM yang memenuhi definisi serta kriteria ekonomi mikro kecil dan menengah sebagaimana yang telah di atur didalam perundang-undangan di indonesia paling tidak selama dua tahun berturut-turut. Dalam SAK EMKM juga dikatakan bahwa entitas yang tidak memenuhi kriteria serta definisi diizinkan untuk menggunakan SAK EMKM jika otoritas yang terkait mengizinkan (Indonesia.2016, n.d.)

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: a) entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau b) entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan ataupedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK EMKM jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK EKM Ketentuan yang ada dalam UU no 20, selain terkait kekayaan bersih dan omset, ada dua hal penting yang perlu di ketahui yaitu: a) usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dan b) tidak memiliki atau menguasai mitra usahanya.

Kehadiran SAK EMKM ini sangat tepat di era sekarang mengingat pesatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tentu membutuhkan sebuah standar yang baku dalam mencatat transaksi keuangan mereka. Dengan munculnya SAK EMKM ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah perlu segera melakukan penyesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan.

Manfaat dan Tujuan SAK EMKM

SAK EMKM dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya

Pada hakikatnya kemajuan ekonomi pada suatu negara tidak terlepas dari campur tangan dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalamnya. Karena UMKM telah memberikan kontribusi terhadap negara dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat negara. Selain itu, juga memberikan kontribusi berupa produk domestik bruto (PDB), dan ekspor nasional. Maka sebenarnya UMKM telah dianggap sebagai salah satu roda penggerak perekonomian bangsa (Ediraras, n.d.)

Namun, sangat disayangkan jika UMKM masih memiliki kendala yang masih terbilang klasik yaitu permodalan suatu operasional perusahaan. Karena di Indonesia telah dibuktikan di tahun 2012 masih terdapat UMKM yang kesulitan mendapatkan dana dari bank sebagai pemodal yang dibuktikan oleh kementerian koperasi dan UKM, hanya 20% yang sudah terakses oleh kredit bank.

Penyebab rendahnya penyaluran kredit adalah karena bank tidak memiliki informasi yang memadai terkait kondisi usaha mikro (Rudiantoro dan Siregar, 2012). Sehingga membuat bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyedia KUR (Kredit Usaha Rakyat) ini sangat berhati-hati dalam memberikan modal kepada UMKM dan dengan demikian, maka bank akan memilih UMKM yang memenuhi persyaratan

dalam pengajuan kredit pinjaman, yang salah satunya adalah laporan keuangan yang akurat dan informative.

Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya (Rudiantoro dan Siregar, 2012:2). Dengan kata lain, mayoritas pengusaha UMKM memiliki kesulitan yaitu kurangnya kedisiplinan serta keterbatasan pengetahuan pemilik dan sumber daya manusia yang dimiliki yang bergerak di bidang akuntansi. Pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk ditetapkan (Idrus, 2000 dalam Mansyur, 2012).

Dengan adanya fenomena tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2009 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) telah menetapkan SAK-ETAP sebagai standar keuangan pada UMKM yang merupakan perusahaan menengah. SAK-ETAP diresmikan diharapkan dapat membantu pengusaha UMKM dalam menerbitkan laporan keuangan yang lebih informatif agar memudahkan investor atau kreditor untuk memberikan bantuan biaya modal perusahaan. Selain itu, juga dapat memberikan kemudahan untuk prediksi kondisi keuangan pada UMKM sebagai persyaratan pengajuan pinjaman ketika mengajukan pinjaman ke bank atau pihak eksternal (Djuwito, n.d.)

KESIMPULAN

Walaupun sudah disediakan SAK-ETAP, masih ada saja beberapa perusahaan menengah yang tidak menggunakan SAK-ETAP. Salah satunya adalah PQR di daerah ABC yang sejak tahun 2014 dalam pencatatan laporan keuangan ini menggunakan sistem komputerisasi, namun pengerjaannya dikerjakan secara manual yaitu hanya sebatas pendapatan dan pengeluaran perusahaan secara sederhana saja. Padahal laporan keuangan merupakan struktur terpenting dalam suatu perusahaan serta sebagai kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas suatu perusahaan di bidang operasional khususnya keuangan.

Sedangkan UMKM XYZ tidak melakukan pencatatan keuangan usahanya sesuai dengan SAK EMKM. Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi UMKM XYZ tidak membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yaitu; a) faktor internal yang merupakan faktor yang berasal dari dalam UMKM itu sendiri dan b) faktor eksternal yakni tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM (*stakeholder*) yakni dari pihak pemerintah, lembaga-lembaga terkait dan regulator.

SARAN

Pemerintah dalam hal ini adalah regulator dan asosiasi profesi khususnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menghimbau kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui sosialisasi dengan memiliki 2 (dua) tujuan di antaranya:

1. Untuk mengimplementasikan cara penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP pada UMKM di Indonesia.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh perusahaan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP.

Dalam sosialisasi SAK-ETAP bagi praktisi akuntansi ini sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh selama pembelajaran dan mampu memperkaya wawasan mengenai cara penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-ETAP. Sedangkan untuk perusahaan UMKM diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna agar ke depannya pemilik maupun karyawan dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan juga sebagai bahan pertimbangan pemiliki perusahaan UMKM dalam mengambil [keputusan ekonomi](#) dan membuat beberapa pilihan alternative pada kebijakan keuangan dalam perusahaan. Sedangkan untuk akademisi, sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan sekaligus menjadi referensi yang memadai untuk penelitian mereka dengan objek kajian yang lebih mendalam mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah juga menjadikan ruang belajar yang sarat nilai positif dan sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan ilmu akuntansi.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Harjito, & Martono. (2014). *Manajemen Keuangan*. Ekonisia.
- Auliyah, I. M. (n.d.). *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UKM Kampung Batik Di Sidoarjo*. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Djuwito. (n.d.). *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil, Menengah Berdasarkan SAK EMKM Di Surabaya*. In *e-jurnal. STIE Perbanas Surabaya*.
- Dwi, P. (n.d.). *Analisis laporan keuangan konsep dan aplikasi. sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN*.
- Ediraras. (n.d.). *Akuntansi Dan Kinerja UMKM. Jurnal Ekonomi Bisnis, 2 Volume 15*.
- Fahmi, I. (n.d.). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Alfabeta: Bandung.
- Friyanto. (2012). *Auditing* (1st ed.). Bayumedia Publishing.
- Hanafi, M. M. da. A. H. (n.d.). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kelima*.
- Harahap, S. S. (n.d.). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Rajawali Pers*.
- Indonesia.2016, I. A. (n.d.). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Indonesia, I. A. (n.d.). *Standar Akuntansi Keuangan. PSAK.Salemba Empat*.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (n.d.). *Agenda • Pilar SAK di Indonesia • Konvergensi IFRS: Mengapa , Manfaat dan Karakteristik IFRS • Kerangka Konseptual • Overview Standar Akuntansi Keuangan*.
- Irsyad, M. A. (n.d.). *Uji Penerapan SAK EMKM Pada Sistem Pembukuan Akuntansi Berbasis Cloud Computing*. E-jurnal. Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Jumingan. (n.d.). *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.

- Kartikahadi. (n.d.). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta. Salemba Empat.
- Martalena, M. da. (n.d.). *Pengantar Pasar Modal (Pertama)*. Yogyakarta.
- Riyanto, R. (n.d.). *Keberadaan Pajak UMKM Bagi Pembangunan Indonesia*.
- Rosdiana. (n.d.). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*. Visimedia.
- Sabella, A., & Sari, P. L. K. K. S. P. T. (n.d.). *Penerapan SAK ETAP*.
- Sariati. (n.d.). *Pelaporan Dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sevany, A. M. (n.d.). *Analisis Kebermanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Yang Dapat Menghasilkan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Dengan Omzet Kecil (Studi Kasus Pada UMKM ARA)*.
- Subramanyam, K. R., & John, J. W. (n.d.). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kesepuluh.
- Tandelilin, E. (2017). Pasar modal : manajemen portofolio & investasi. In *Yogyakarta : Konisius*.
- Ujiyantho, M. A., & Pramuka, B. A. (n.d.). Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 10(6), 1–26.
- Wahyudiono. (n.d.). *Mudah Membaca Laporan Keuangan*. Raih Asa Sukses.
- Warsono, S. bin H., & Irene Natalia, R. C. (n.d.). *Akuntansi Pengantar 1 Sistem Penghasil Informasi*.
- Weston, J., & Brigham, E. (n.d.). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Jilid 1)*. Salemba Empat.
- Weston, J., & Brigham, E. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan (Jilid 1)*. Salemba Empat.
- <http://keuanganism.com/perbedaan-sak-etap-dengan-psak/tribun.news>
- <http://akuntansi.uma.ac.id/2021/11/06/10-buku-akuntansi-terbaik-untuk-pemula/>